

**INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) UNTUK
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI DITINJAU DARI
PRINSIP EKONOMI HIJAU**

Yessica Esther Siregar¹ dan Arvie Johan²

INTISARI

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerapkan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0% bagi kendaraan listrik berbasis baterai sebagai upaya mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi implementasi insentif tersebut melalui metode hukum normatif-empiris yang mencakup analisis regulasi serta wawancara dengan pejabat pemerintah di bidang keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini selaras dengan prinsip ekonomi hijau, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan infrastruktur pengisian daya dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi non-fiskal, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, dan evaluasi kebijakan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran insentif PKB dalam mendorong transportasi berkelanjutan di DIY.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan Listrik, Ekonomi Hijau, Insentif Fiskal, Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

MOTOR VEHICLE TAX (PKB) INCENTIVES FOR BATTERY ELECTRIC

VEHICLES FROM THE PERSPECTIVE OF GREEN ECONOMY

PRINCIPLES.

Yessica Esther Siregar³ dan Arvie Johan⁴

ABSTRACT

The Government of the Special Region of Yogyakarta (DIY) has implemented a 0% Motor Vehicle Tax (PKB) incentive for battery electric vehicles to support the transition toward sustainable development. This study evaluates the incentive's implementation using a normative–empirical legal approach that includes regulatory analysis and interviews with government officials responsible for financial administration, development planning, and environmental management. The results show that the policy aligns with green economy principles but remains limited by inadequate charging infrastructure and insufficient inter-agency coordination. The study recommends strengthening non-fiscal measures, accelerating supporting infrastructure, and ensuring continuous policy evaluation to enhance the PKB incentive's role in promoting sustainable transportation in DIY.

Keywords: *Motor Vehicle Tax, Electric Vehicles, Green Economy, Fiscal Incentives, Special Region of Yogyakarta.*

³ Undergraduate law student at Tax Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer at Tax Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.